
**Hydrosolidarity di Sungai Nil: Peran Nile Basin Initiative dalam
Manajemen Sungai Lintas Batas**

Muhammad Aditya Purnomo

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Indonesia

adityapurnomo216@gmail.com

JURNAL ILMIAH HUBUNGAN INTERNASIONAL
Parahyangan Centre for International Studies (PACIS)
Parahyangan Catholic University
Bandung

ISSN: 1693-556x

E-ISSN: 2406-8748

VOLUME 18 No. 1

Hal. 55 - 73

<https://doi.org/10.26593/jihi.v18i1.4362.55-73>

Hydrosolidarity di Sungai Nil: Peran Nile Basin Initiative dalam Manajemen Sungai Lintas Batas

Muhammad Aditya Purnomo

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Indonesia

adityapurnomo216@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan menunjukkan pentingnya peran NBI dalam manajemen sungai Nil. Daerah aliran sungai lintas batas merupakan sumber air yang penting bagi kehidupan sebanyak 2 miliar jiwa di seluruh dunia. Aliran air tersebut memenuhi kebutuhan air domestik, air minum, irigasi, agrikultur, industri, serta pembangkit listrik. Di wilayah timur-laut Afrika, sungai Nil memegang peran penting tersebut bagi sebelas negara di wilayah alirannya. Selain sebagai sungai terpanjang di dunia, sungai Nil mendukung kehidupan sebanyak lebih dari 300 juta penduduk, yang diestimasikan akan mengalami peningkatan pesat pada tiga hingga empat dekade mendatang. Meningkatnya populasi akan berpengaruh pada ketersediaan air dikarenakan meningkatnya permintaan di sektor agrikultur, domestik, serta industri. Negara-negara wilayah sungai Nil menyadari bahwa langkah terbaik dalam penggunaan, perlindungan, serta manajemen sungai tersebut secara berkelanjutan dan terintegrasi adalah melalui kerjasama internasional bersama. Pada tahun 1999 terbentuk Nile Basin Initiative (NBI) yang beranggotakan negara-negara wilayah sungai Nil yang bertujuan memfasilitasi diskusi kerjasama terkait manajemen sungai tersebut. Teori yang digunakan di tulisan ini adalah teori hydrosolidarity. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NBI berperan penting dalam manajemen sungai Nil sebagai sebuah struktur institusi yang mendukung kerjasama, sebagai pendukung partisipasi pemangku kepentingan, mendukung penyebaran data dan pengetahuan antar negara anggota, serta mendukung adanya integrasi dan perhubungan.

Kata kunci: Hydrosolidarity; Nile Basin Initiative; Sungai Nil; Sungai Lintas Batas

ABSTRACT

This article aims to explain the importance of NBI's role in Nile River management. Transboundary basins are important water resources for 2 billion lives across the world. Those basins fulfil domestic water, drinking water, agriculture, industry, and electric generator needs. In north-east of Africa, Nile river plays the important role for its eleven riparian states. Nile river, being the longest river in the world, supports the lives of more than 300 million people, and the number is estimated to rise greatly in three to four decades in the future. The increase of population will affect the availability of water as the demands of agriculture, domestic, and industry grow. Nile riparian states realized that the best option in using, protecting, and managing the river in a sustainable and integrated manner is through international cooperation. In 1999, Nile Basin Initiative (NBI) was established with Nile riparian states as its member, with the purpose of facilitating discussions of cooperation regarding the management of the river. This article uses the theory of hydrosolidarity. Results show that NBI has important roles in Nile river management, namely in the creation of a cooperative institutional structure, supporting stakeholder participations, supporting data and knowledge sharing, and supporting integrations and linkages.

Keywords: Hydrosolidarity; Nile Basin Initiative; Nile River; Transboundary River

Pendahuluan

Daerah aliran sungai lintas batas / *Transboundary basins* merupakan sumber air yang penting bagi kebutuhan air domestik, air minum, irigasi agrikultur, fungsional industri, dan pembangkit listrik untuk 2 miliar jiwa di seluruh dunia.¹ Di wilayah timur-laut Afrika, Sungai Nil memegang peranan penting bagi kehidupan negara-negara sepanjang sungai / *riparian states* terutama dalam memenuhi kebutuhan air, energi, serta produksi agrikultur.² Sungai Nil merupakan sungai terpanjang di dunia yang memiliki panjang 6,825 kilometer.³ Aliran sungai tersebut kaya akan keragaman ekosistem, serta memiliki wilayah tangkapan air yang diperkirakan mencapai 10 persen dari luas benua Afrika.⁴ *Riparian states* di Sungai Nil antara lain meliputi: Burundi, Republik Demokratik Kongo, Mesir, Ethiopia, Eritrea, Kenya, Rwanda, Sudan, Sudan Selatan, Tanzania, dan Uganda.⁵ Sungai Nil memiliki peranan politik, ekonomi, serta budaya yang penting bagi sebelas negara di wilayah aliran tersebut.⁶ Sungai Nil merupakan sumber daya krusial bagi pembangunan ekonomi negara-negara wilayah aliran sungai tersebut, serta sebagai sumber penghidupan masyarakatnya.⁷ Masyarakat memanfaatkannya untuk sumber pemancingan, irigasi, serta sarana transportasi air.⁸ Sungai tersebut mendukung kehidupan 370 juta penduduk, yang diestimasikan meningkat jumlahnya dua kali lipat pada 3-4 dekade mendatang.⁹ Meningkatnya populasi sungai Nil akan berakibat pada semakin berkurangnya suplai air, yang juga didorong oleh meningkatnya permintaan di sektor agrikultur, domestik, serta industri wilayah tersebut. Ketersediaan air wilayah tersebut juga terancam oleh perubahan iklim, polusi, serta meningkatnya aktivitas agrikultur dan industri.¹⁰

Persoalan ketersediaan air tidak hanya menjadi perhatian negara berkembang namun juga negara maju. Namun negara maju cenderung memiliki kapasitas energi, teknologi, serta investasi yang memungkinkan mereka untuk mendaur ulang air dan mendesalinasi air laut. Negara berkembang, terutama yang tengah dihadapkan dengan persoalan kemiskinan dan hutang, cenderung tidak memiliki banyak opsi dalam menghadapi kelangkaan air.¹¹ Meski wilayah aliran Sungai Nil kaya akan sumber

¹ UNECE, *Policy Guidance Note on the Benefits of Transboundary Water Cooperation: Identification, Assessment and Communication*, United Nations Publication, 2015. <https://www.unece.org/index.php?id=41340>

² Mugahid Elnour, "The impact of the Grand Ethiopian Renaissance Dam on the Water-Energy-Food security nexus in Sudan" (Master's thesis, Uppsala University, 2019), 1. <http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1359791/FULLTEXT01.pdf>

³ Ana Elisa Cascão, "Nile water governance," dalam *The Nile River Basin: water, agriculture, governance, and livelihoods*, eds. Seleshi Bekele Amulachew et al (Abingdon: Routledge, 2012), 230. http://www.iwmi.cgiar.org/Publications/Books/PDF/the_nile_river_basin-water_agriculture_governance_and_livelihoods.pdf

⁴ Alebel Abebe Belay et al, "SWOT Analysis and Challenges of Nile Basin Initiative: An Integrated Water Resource Management Perspective," *Chinese Journal of Population, Resources and Environment* Vol.8 no. 1 (2010): 8. DOI:10.1080/10042857.2010.10684960

⁵ FAO dan IHE-Delft, *Water Accounting in the Nile River Basin*. FAO WaPOR water accounting reports, Roma, Italia: FAO, 2020, 1. <https://doi.org/10.4060/ca9895en>

⁶ Dalia Abdelhady et al, "The Nile and the Grand Ethiopian Renaissance Dam: Is There a Meeting Point between Nationalism and Hydrosolidarity?," *Journal of Contemporary Water Research & Education* Issue 155 (2015): 73. <https://doi.org/10.1111/j.1936-704X.2015.03197.x>

⁷ Belay et al, "SWOT Analysis and Challenges of Nile Basin Initiative: An Integrated Water Resource Management Perspective," 8

⁸ Nile Basin Initiative, "Developing the Nile: Challenges and Opportunities," *Bridging the Nile: Unity and Growth Through the Shared Vision Program*, n.d. <https://nilebasin.org/documents-publications/31-bridging-the-nile-unity-and-growth-through-the-shared-vision-program/file>

⁹ Abdelhady et al, "The Nile and the Grand Ethiopian Renaissance Dam: Is There a Meeting Point between Nationalism and Hydrosolidarity?," 73.

¹⁰ *Water Accounting in the Nile River Basin*, ix.

¹¹ Randa el Bedawy, "Water Resources Management: Alarming Crisis for Egypt," *Journal of Management and Sustainability* Vol.4 no.3 (2014): 108. DOI:10.5539/JMS.V4N3P108

daya alam, negara-negara wilayah tersebut masih termasuk salah satu golongan termiskin dunia.¹² Dalam konteks kemiskinan dan kondisi kesusahan yang dialami oleh masyarakat khususnya di tingkat bawah, konflik baik yang bersifat antar negara maupun konflik internal negara memiliki peluang yang sangat besar untuk muncul.¹³ Untuk menanggulangnya, maka para pemikir hubungan internasional khususnya yang menganut mazhab liberalisme menganjurkan adanya kerjasama ekonomi internasional untuk mengurangi peluang munculnya konflik dan mempererat hubungan antarnegara di kawasan.¹⁴

Negara-negara wilayah Sungai Nil menyadari bahwa langkah terbaik dalam manajemen sungai tersebut secara berkelanjutan dan terintegrasi adalah melalui kerja sama internasional. Kerja sama tersebut juga dianggap sebagai salah satu tantangan terhebat dalam agenda air global.¹⁵ Pada tahun 1999, Nile Basin Initiative (NBI) terbentuk dengan melibatkan negara-negara aliran Sungai Nil. Tujuannya adalah memfasilitasi diskusi kerja sama dalam lingkup aliran sungai tersebut.¹⁶ Terbentuknya NBI merupakan sebuah sorotan penting dalam proses kerja sama di Sungai Nil.¹⁷ Keberadaan NBI juga merupakan sebuah capaian besar dalam manajemen Sungai Nil sebagai sumber air bersama. NBI dianggap merefleksikan sebuah visi bersama yang strategis oleh negara-negara wilayah sungai Nil terkait penggunaan air bersama.¹⁸ Pada hari peringatan 20 tahun berdirinya NBI yang diadakan Februari 2019, World Bank menyatakan bahwa nilai proyek investasi NBI telah mencapai US\$ 6 miliar. NBI juga dikatakan tengah mengimplementasikan proyek dengan pendanaan senilai hampir US\$ 1.5 miliar. Secara garis besar, World Bank menyatakan bahwa kolaborasi di wilayah Sungai Nil telah mengalami peningkatan pesat selama 20 tahun sejak berdirinya NBI.¹⁹

Studi dari Merrill tahun 2008 menemukan bahwa NBI mampu menciptakan forum bersama antar negara-negara anggota guna membahas persoalan bersama. Melalui forum tersebut, NBI mampu secara efektif mendorong adanya pendanaan serta pembagian informasi yang kemudian mendukung berjalannya perjanjian dan proyek multilateral. Keberadaan NBI juga dikatakan merupakan sebuah transformasi dari proses pengambilan keputusan yang cenderung bersifat unilateral dan bilateral menjadi multilateral terkait manajemen sumber daya air sungai Nil. Merrill menginterpretasi dari pendekatan Neo-fungsionalisme bahwa keberadaan NBI serta *subsidiary program* nya merupakan langkah progresif dalam proses integrasi. Disamping itu, NBI mampu mengundang adanya kerja sama organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan World Bank untuk menjalankan proyek-proyek yang memberikan manfaat bersama.²⁰

Knaepen dan Byers tahun 2017 meneliti aktor yang terlibat dalam NBI serta faktor-faktor penting yang mempengaruhi operasional institusi tersebut. Studi tersebut menemukan bahwa kehadiran donor pembangunan internasional memegang peranan penting dalam kebutuhan sumber

¹² Yasir Mohamed dan Makonnen Loulseged, "The Nile Basin Water Resources: Overview of Key Research Questions Pertinent to the Nile Basin Initiative," *IWMI Working Paper 127* (2008): 1.

http://www.iwmi.cgiar.org/Publications/Working_Papers/working/WOR127.pdf

¹³ Putu Agung Nara Indra Prima Satya, "COVID-19 dan Potensi Konflik Sosial", *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Special Edition COVID-19 no.3* (April 2022): 39-45, DOI : <https://doi.org/10.26593/jihi.v1i1.3867.39-45>.

¹⁴ John R.V Korwa, "The China-Australia Free Trade Agreement(ChAFTA): Its Implications for Australia-United States Relations", *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol.15 No.1* (2019): 41-53, DOI: <https://doi.org/10.26593/jihi.v15i1.2981.41-53>.

¹⁵ Belay et al, "SWOT Analysis and Challenges of Nile Basin Initiative," 9.

¹⁶ Nile Basin Initiative, *Corporate Report 2020*, 2020, 6. <https://nilebasin.org/documents-publications/88-corporate-report-2020>

¹⁷ Cascão, *Nile Water Governance*, 229.

¹⁸ Mohamed dan Loulseged, "The Nile Basin Water Resources: Overview of Key Research Questions," vii.

¹⁹ The World Bank, "Stronger Together: 20 Years of Cooperation Around the Nile," *The World Bank*, 22 Februari 2019. <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2019/02/22/stronger-together-20-years-of-cooperation-around-the-nile> (diakses 27 Oktober, 2020).

²⁰ John C. Merrill, "Water Management and Decision-Making in the Nile Basin: A Case Study of the Nile Basin Initiative," (Master's thesis, Scholar Commons University of South Florida Libraries, 2008). <https://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1401&context=etd>

daya NBI. Hal ini dikarenakan NBI masih sangat bergantung pada donor eksternal terkait kebutuhan sumber daya. Kehadiran donor eksternal juga membantu NBI dalam mengkoordinasi masuknya bantuan melalui adanya komite khusus. Kontribusi dari negara anggota juga memegang peranan penting dalam operasional NBI, dikarenakan tingginya proporsi kontribusi tersebut terhadap budget operasional. Peran negara anggota juga penting dalam menyetujui rencana kerja NBI. Hal ini dikarenakan pihak kementerian negara anggota terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan regional. Disamping itu, kepentingan negara-negara anggota juga memegang peran penting dalam kerja sama regional. Pembangunan infrastruktur di wilayah sungai menjadi salah satu contoh kepentingan negara anggota dalam NBI, yang dapat mendorong negara anggota tertentu untuk meningkatkan dukungan terhadap NBI, maupun dalam mendorong negara anggota lainnya untuk menandatangani agenda tertentu.²¹

Pemaparan studi terdahulu di atas memberikan penulis gambaran terkait bagaimana NBI dan keterlibatan aktor berperan penting dalam kerja sama di sungai Nil. Namun yang menjadi *gap* dari penelitian di atas adalah masih dibutuhkan sebuah pendekatan penelitian yang mampu secara lebih luas dan menyeluruh dalam menjelaskan peran NBI terkait kerja sama di sungai Nil. Pada artikel ini, penulis mencoba mengisi *gap* tersebut menggunakan pendekatan *Hydrosolidarity*. Penulis berargumen bahwa melalui pendekatan *Hydrosolidarity*, tulisan ini mampu menunjukkan pentingnya peran NBI sebagai promotor kerja sama di wilayah sungai Nil melalui 4 fitur yang terkandung dalam pendekatan tersebut, yakni sebagai sebuah struktur institusi kooperatif, sebagai sarana partisipasi para pemangku kepentingan di wilayah aliran sungai Nil, sebagai pendukung pengembangan terhadap pembagian pengetahuan dan informasi antar negara anggota, dan sebagai penguat terhadap integrasi dan perhubungan di wilayah Sungai Nil.

Metodologi

The Notion of Hydrosolidarity

Hydrosolidarity didefinisikan sebagai sebuah usaha untuk membangun pemahaman bersama, kebaikan bersama, dan etika yang berhubungan dengan air bersama / *shared waters*. Gagasan ini dianggap sebagai kebalikan dari gagasan *hydroegoism*, yakni pandangan keegoisan yang cenderung mengutamakan kepentingan geopolitik pihak sendiri. *Hydrosolidarity* merupakan sebuah kerangka pemikiran konseptual yang dikembangkan Falkenmark guna menganalisis aspek manajemen air.²² Falkenmark dan Folke menyatakan bahwa *Hydrosolidarity* merupakan keharusan untuk mencapai rekonsiliasi terhadap konflik kepentingan dengan pendekatan berbasis solidaritas terhadap kepentingan kehidupan manusia guna melawan konsekuensi lingkungan yang tidak dapat dihindari.²³

Wouters, Vinogradov, dan Magsig (2013) dalam tinjauan literturnya mengenai berbagai definisi *water security*, melibatkan adanya gagasan *hydrosolidarity* dalam salah satu definisi tersebut. Wouters, Vinogradov, dan Magsig mengutip literatur Falkenmark yang menyatakan bahwa *water security* terhubung dengan adanya suplai air serta sanitasi yang aman, air untuk produksi pangan, adanya *hydrosolidarity* antara mereka yang tinggal di hulu dan mereka yang tinggal di hilir, serta menghindari polusi air, sehingga lapisan air tanah serta air sungai tetap dapat digunakan untuk suplai air, produksi industri, penggunaan agrikultur maupun perlindungan terhadap biodiversitas, lahan

²¹ Hanne Knaepen dan Bruce Byiers, "Understanding the Nile Basin Initiative: Balancing historical rights, national needs and regional interests," *Political Economy Dynamics of Regional Organisations (PEDRO) Background Papers* (2017). <https://ecdpm.org/wp-content/uploads/NBI-Background-Paper-PEDRO-Political-Economy-Dynamics-Regional-Organisations-Africa-ECDPM-2017.pdf>

²² Andrea K. Gerlak, Robert G. Varady, & Arin C. Haverland, "Hydrosolidarity and International Water Governance," *International Negotiation* 14 (2009): 312-313, DOI: 10.1163/157180609X432842

²³ Malin Falkenmark dan Carl Folke, "The ethics of socio-ecohydrological catchment management: towards hydrosolidarity," *Hydrology and Earth System Sciences* 6, Issue No. 1 (2002): 4. <https://doi.org/10.5194/hess-6-1-2002>

basah, serta ekosistem air baik di sungai maupun lautan.²⁴ Menurut Wouters, Vinogradov, dan Magsig, *hydrosolidarity* dapat digunakan sebagai sebuah sarana pendekatan yang mampu memberikan perspektif baru terkait *water security*.²⁵ Proses terbentuknya *hydrosolidarity* meliputi adanya fokus terhadap pembentukan rezim legal yang berpusat ke norma keadilan dan kelayakan, mengacu pada wilayah aliran sungai sebagai unit manajemen, dengan peningkatan terhadap transparansi, serta adanya komitmen dalam meningkatkan kapasitas lokal. Adanya aksi kolektif yang didasari mekanisme kerja sama meliputi pembentukan serta implementasi perjanjian, pembentukan dan dukungan terhadap mekanisme institusi lintas batas, pengumpulan dan membagikan data serta informasi ilmiah, bergerak bersama komunitas masyarakat guna memastikan partisipasi publik, merupakan syarat-syarat dalam mencapai *regional water security*. Kemudian kehadiran gagasan *hydrosolidarity* semakin memperluas spektrum keterlibatan aktor, serta pemahaman terhadap aksi kolektif, meliputi manfaat dari adanya kerja sama global dan penguatan pemerintahan air terutama dalam konteks aliran air lintas batas.²⁶ Wouters, Vinogradov, dan Magsig menyatakan bahwa gagasan *Hydrosolidarity* memberikan sarana dalam mencapai *water security*. Hal ini dikarenakan pusat dari gagasan tersebut terletak pada keharmonisan kepentingan serta tanggung jawab terkait manajemen aliran air secara menyeluruh, yang kemudian diwujudkan dengan adanya kesepakatan untuk memberikan dukungan dan aksi kolektif. Wouters, Vinogradov, dan Magsig juga menambahkan bahwa *hydrosolidarity* menyatakan bahwa manajemen air lintas batas terbaik dapat dicapai melalui adanya strategi bersama, yang diimplementasikan oleh sebuah institusi manajemen bersama dan ditujukan untuk mencegah munculnya *water disputes*, serta menjamin penggunaan yang optimal terhadap air sebagai sumber daya penting demi manfaat seluruh negara-negara di wilayah aliran.²⁷

Gerlak, Varady, dan Haverland menyatakan bahwa dalam gagasan *Hydrosolidarity* terdapat *Functional Value* yang berisikan sejumlah 4 (empat) fitur terkait pemerintahan air lintas batas dalam skala *cross-national*, yakni: 1) *creation of a cooperative institutional structure*; 2) *promotion of stakeholder participation*; 3) *development of shared knowledge*; dan 4) *enhanced integration and linkages*.²⁸

Pada fitur pertama, *creation of a cooperative institutional structure*, gagasan *Hydrosolidarity* mampu mendukung adanya perkembangan sebuah struktur institusi yang mendukung kerjasama pada sungai bersama. Secara garis besar fitur pertama meliputi adanya perkembangan pada poin-poin penting berikut: 1) *development of national plans*; 2) *donor coordinating committees*; 3) *river parliaments*; 4) *strategic action plans*; dan 4) *river basin organizations*. Menurut Gerlak, Varady, dan Haverland, fitur pertama menekankan pada pengembangan kerja sama pada air bersama melalui terbentuknya sebuah institusi sungai regional. Gerlak, Varady, dan Haverland menekankan pada pernyataan Anthony Turton, seorang peneliti *water-governance* Afrika Selatan bahwa kehadiran *shared water-management regimes* merupakan sebuah manifestasi yang bersifat *durable* dari *hydrosolidarity*, dan juga merupakan langkah yang dibutuhkan dalam ‘desekuritisasi’ diskursus air. Gerlak, Varady, dan Haverland mengutip studi terdahulu bahwa terdapat pemikiran yang mengaitkan antara adanya manajemen bersama, dan perlindungan terhadap sungai lintas batas. Organisasi donor juga menekankan pentingnya sebuah mekanisme pemerintahan baru melalui pembentukan sebuah institusi wilayah aliran sungai yang bertujuan meningkatkan kerja sama dalam lingkup air bersama. Secara garis besar, adanya sebuah institusi yang mampu mengakomodasi secara politik, serta berisikan

²⁴ Patricia Wouters, Sergei Vinogradov, & Bjørn-Oliver Magsig, “Water Security, Hydrosolidarity, and International Law: A River Runs Through It . . .,” *2009 Yearbook of International Environmental Law*, (2009): 105. <https://ssrn.com/abstract=2365328>

²⁵ Wouters, Vinogradov, & Magsig, 127-128.

²⁶ Ibid, 130-131.

²⁷ Ibid, 132.

²⁸ Gerlak, Varady, & Haverland, “Hydrosolidarity and International Water Governance,” 317.

pihak-pihak berwenang dari negara-negara wilayah aliran sungai, akan mampu membantu mengoordinasi kepentingan-kepentingan serta mengurangi kemungkinan munculnya konflik di wilayah sungai tersebut. Sebagai tambahan, negara-negara yang terlibat perlu untuk terbuka dalam mengadakan negosiasi yang mempromosikan kerja sama.²⁹

Fitur kedua, *promotion of stakeholder participation*, menekankan pada pentingnya partisipasi para pemangku kepentingan dalam menjaga ketahanan jangka panjang terhadap sungai yang bersangkutan. Hal ini juga penting guna menjaga benefit bagi generasi mendatang. Disamping partisipasi pemangku kepentingan, fitur ini juga menekankan partisipasi publik / *public participation* sebagai komponen penting dalam *hydrosolidarity*. Gerlak, Varady, dan Haverland mengutip tulisan dari World Water Forum Asia-Pacific Regional Document tahun 2006 yang menyatakan bahwa kehadiran partisipasi publik mampu membantu mengeliminasi, atau meminimalisir adanya korupsi, maupun pelanggaran hak. Disamping itu, kurangnya partisipasi publik akan menciptakan sebuah kontrol yang dikenal dengan sebutan *hydroegoism*. Guna melawan *hydroegoism*, setiap sektor baik sektor pembangkit listrik tenaga air, irigasi, suplai air, serta rekreasi, harus mengirimkan perwakilannya guna mengembangkan aturan manajemen air yang dapat diterima bersama. Maka dari itu, keterlibatan para pemangku kepentingan serta para pihak pengguna air dalam konsultasi menjadi penting.³⁰

Fitur ketiga adalah *development of shared knowledge*. Fitur ini mengacu pada pengadaan saluran komunikasi antara negara-negara yang berbagi sumber daya air sungai. Hal ini dilakukan dengan tujuan *data exchange*, atau pertukaran data. Mengintegrasikan *information sharing* kedalam proses pengambilan keputusan merupakan esensi penting dalam manajemen air bersama. Pada fitur ini, Gerlak, Varady, dan Haverland merangkum sejumlah argumen terkait pentingnya *information sharing* dalam *transboundary water*. Pertama, argumen dari studi Miles et al tahun 2002 dan Uitto dan Duda tahun 2002 yang menyatakan bahwa adanya diskusi ilmiah dapat mendukung munculnya kepercayaan antara negara dan pemangku kepentingan. Kedua, argumen dari studi Dimitrov tahun 2006 dan Varady dan Morehouse tahun 2003 menyatakan bahwa adanya pengetahuan ilmiah yang dapat dipercaya mengenai konsekuensi negatif lintas batas yang muncul dari adanya persoalan tertentu, merupakan esensi penting dalam perumusan perjanjian kebijakan internasional yang kemudian digunakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Ketiga, argumen dari studi Martyr tahun 2001 dan Wolf tahun 1997 menyatakan bahwa adanya investigasi bersama terhadap aspek ilmiah terhadap suatu masalah dan kemungkinan solusi, merupakan langkah memitigasi persoalan terkait keadilan. Keempat, argumen dari studi Lautze dan Giordano tahun 2007 yang menyatakan bahwa adanya data dapat digunakan sebagai modal negosiasi, dan *data-sharing* dapat mengarah ke temuan-temuan baru dalam negosiasi yang kemudian mengarah ke *progress* yang lebih jauh.³¹

Fitur keempat mengacu pada *enhanced integration and linkages*. Gagasan *hydrosolidarity* merupakan perluasan dari prinsip *integrated water resources management* (IWRM). IWRM mengacu pada integrasi sektor-sektor berbeda yang meliputi industri, agrikultur, energi, transportasi, serta perlindungan lingkungan dalam manajemen sungai. Gerlak, Varady, dan Haverland mengacu pada pernyataan Falkenmark, yakni bahwa gagasan *hydrosolidarity* dapat membangun *linkages* antara *food security*, *water security*, dan *environmental security*. Selanjutnya, Gerlak, Varady, dan Haverland mendukung pernyataan Global Environment Facility (GEF) bahwa manajemen yang saling terhubung / *linked management* dapat memastikan bahwa aktivitas di wilayah hulu akan selalu bersifat terencana dan terimplementasi didasari oleh pengetahuan penuh terkait potensi dampak terhadap ekosistem dan aktivitas ekonomi serta kesejahteraan ekosistem dan siklus air, dan bertujuan mendukung

²⁹ Gerlak, Varady, & Haverland, "Hydrosolidarity and International Water Governance," 317-318.

³⁰ Gerlak, Varady, & Haverland, 318-319.

³¹ Gerlak, Varady, & Haverland, "Hydrosolidarity and International Water Governance," 319.

pembangunan berkelanjutan terhadap wilayah aliran sungai tinggi maupun rendah. Kemudian Gerlak, Varady, dan Haverland menambahkan pernyataan Organization of American States (OAS) bahwa *hydrosolidarity* mendukung perkembangan terhadap *national water plans* dari negara-negara wilayah aliran sungai. *National water plans* tersebut kemudian dapat digunakan sebagai sarana konseptualisasi persoalan bersama, serta mendukung *hydrosolidarity* sebagai konsep politik yang kemudian dapat mendukung kerja sama multi-jurisdiksi.³²

Analisis

a. Dinamika Kerja sama Sungai Nil Pra-NBI

Organisasi sungai lintas batas pertama di sungai Nil adalah Hydromet, yang berdiri pada 1967 hingga 1993. Organisasi tersebut beranggotakan negara wilayah sungai Nil kecuali Ethiopia dan Republik Demokratik Kongo. Tujuan dibentuknya Hydromet adalah sebagai badan penelitian yang mencegah bencana banjir. Pada tahun 1971 dan 1977 secara berurutan, Ethiopia dan Republik Demokratik Kongo bergabung dengan Hydromet dengan berstatus sebagai pengamat. Pada tahun 1970, Mesir dan Sudan menyampaikan proposal guna membentuk badan *Nile Basin Commission*, namun negara-negara anggota lainnya menolak untuk bekerja sama, dan cenderung bersikap saling tidak percaya. Hal ini dikarenakan kurangnya keuntungan bagi mereka, serta adanya kemungkinan berkurangnya hak alokasi mereka terhadap air sungai Nil.³³

Pada tahun 1983 hingga 1993, Mesir memulai sebuah proyek yang dikenal dengan sebutan 'UNDUNGU'. Tujuannya adalah untuk membentuk *Nile Basin Economic Community*. Proyek tersebut beranggotakan Mesir, Sudan, Uganda, Zaïre, dan Demokratik Republik Kongo. Kemudian Burundi dan Rwanda turut bergabung. UNDUNGU bertujuan menciptakan keuntungan bersama terkait infrastruktur, lingkungan, budaya, serta perdagangan. Namun badan tersebut dibubarkan tanpa mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan.³⁴

Pada tahun 1992, pihak kementerian air Mesir, Sudan, Rwanda, Tanzania, Uganda, dan Demokratik Republik Kongo membentuk badan yang dikenal dengan sebutan TECCONILE. Badan tersebut merupakan penerus badan Hydromet pasca penutupan di tahun 1992. Operasionalnya dimulai Januari 1993, dan memiliki lokasi sekretariat di Uganda. Tujuan TECCONILE pada awalnya terkait dengan aspek lingkungan dan kualitas air sungai Nil. Namun badan tersebut menambahkan aspek kesetaraan hak atas air sungai Nil bagi negara-negara wilayah sungai pada tahun 1995.³⁵ TECCONILE memulai serta memfasilitasi pembentukan rencana kerja *Nile River Basin Action Plan* (NRBAP). Dokumen tersebut menjadi kerangka yang kemudian berkembang menjadi pembentukan NBI di tahun 1999.³⁶

Pada 22 Februari 1999, badan NBI terbentuk. Inisiatif ini beranggotakan negara-negara wilayah aliran Sungai Nil, serta bertujuan memberikan sebuah kerangka kerja lingkup sungai guna melawan kemiskinan serta mempromosikan kerja sama ekonomi regional.³⁷ Mesir, Ethiopia, Burundi,

³² Gerlak, Varady, & Haverland, 320-321.

³³ Yaekob Mekuria Abawari, "Conflict and Cooperation among the Nile Basin Countries with Special Emphasis on the Nile Basin Initiative (NBI)," (Master's Thesis, International Institute of Social Studies, 2011), 19, hdl.handle.net/2105/10809

³⁴ Abawari, "Conflict and Cooperation among the Nile Basin Countries with Special Emphasis on the Nile Basin Initiative (NBI)," 19-20.

³⁵ Abawari, 20.

³⁶ Cascão, *Nile Water Governance*, 232.

³⁷ Magdy Hefny dan Salah El-Din Amer, "Egypt and the Nile Basin," *Aquatic Sciences* 67, (2005): 45. DOI 10.1007/s00027-004-0765-y

Demokratik Republik Kongo, Sudan, Tanzania, Rwanda, serta Uganda pada inisiatif ini berusaha bekerja sama guna memaksimalkan manfaat dari Sungai Nil. Pada pertemuan awal, negara-negara anggota NBI masih sulit dalam bekerja sama, dan pertemuan cenderung diisi dengan ketegangan. Disamping itu, tidak semua negara anggota hadir dalam sesi-sesi pertemuan. World Bank menyatakan bahwa tantangan pada awal berdirinya NBI adalah membangun rasa percaya guna memungkinkan adanya kerja sama terhadap tujuan bersama.³⁸

b. Nile Basin Initiative

Pada tahun 1999, negara-negara wilayah aliran Sungai Nil, yakni Burundi, Republik Demokratik Kongo, Mesir, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Sudan, Tanzania, Uganda, namun tidak termasuk Eritrea, mendirikan badan yang dikenal dengan sebutan *Nile Basin Initiative*. Secara lebih spesifik, terdapat 5 poin tujuan dibentuknya NBI, sebagaimana tercantum dalam laporan World Bank tahun 2015, yakni: 1) *To develop the Nile Basin water resources in a sustainable and equitable way to ensure prosperity, security, and peace for all its peoples*; 2) *To ensure efficient water management and the optimal use of the Nile resources*; 3) *To ensure cooperation and joint action between the riparian countries, seeking win-win gains*; 4) *To target poverty eradication and promote economic integration*; dan 5) *To ensure that the program enabled a move from planning to action*.³⁹ Dalam NBI, pihak tertinggi yang bertugas sebagai pengambil keputusan serta perumus kebijakan adalah Nile Council of Ministers (Nile-COM). Tugasnya secara spesifik meliputi perumusan kebijakan, sebagai pihak yang menyetujui program dan proyek, serta menyetujui budget dan rencana kerja. Disamping badan Nile-COM, dibentuk sebuah badan yang dikenal dengan sebutan *Nile Technical Advisory Committee* (Nile-TAC) yang beranggotakan pihak resmi pemerintahan negara anggota inisiatif tersebut, dan bertugas sebagai pengawas kinerja NBI sekaligus sebagai perantara dengan para mitra pembangunan.⁴⁰

c. NBI sebagai *Creation of a Cooperative Institutional Structure*

Poin pertama dalam *Creation of a cooperative Institutional Structure* mengacu pada perencanaan nasional (*national plan*). Pada poin ini, NBI mengoordinasikan aktivitasnya pada tingkat nasional negara anggotanya. Menurut laporan World Bank tahun 2003, NBI akan membangun kantor-kantor koordinasi yang dikenal dengan NBI focal points atau National NBI Office di tiap negara anggota. Operasional serta pendanaan tiap kantor akan menjadi wewenang pemerintah negara anggota. Pemerintah akan berperan penting dalam mengoordinasikan program kerja NBI ke tingkat nasional.⁴¹ Tiap kantor akan dipimpin oleh anggota *Technical Advisory Committee* dari NBI. NBI meluncurkan sebuah program besar bernama Shared Vision Program yang bersikan sejumlah sub-program (lihat pembahasan poin keempat dibawah) yang secara garis besar bertujuan meningkatkan koordinasi antar negara-negara anggota. Penulis akan secara spesifik menyebutkan aktivitas dan sub-program yang berkaitan dengan pembahasan poin pertama. Pada sub-program *Nile Trans-Boundary Environmental Action Project* (NTEAP), NBI membantu negara anggota dalam penguatan institusi nasional dalam pembahasan isu ancaman lingkungan lintas batas. Beberapa contohnya meliputi: Republik Demokratik

³⁸ World Bank Group, *Cooperation on the Nile – Bringing Down the Glass Wall*. 2016.

<https://olc.worldbank.org/content/cooperation-nile-bringing-down-glass-wall>

³⁹ *Cooperation on the Nile – Bringing Down the Glass Wall*.

⁴⁰ Joel Okundi Obengo, "Hydropolitics of the Nile: The case of Ethiopia and Egypt," *African Security Review* 25, no. 1, (2016): 99.

<https://doi.org/10.1080/10246029.2015.1126527>

⁴¹ The World Bank, *Project Appraisal Document for the Shared Vision Program of the Nile Basin Initiative*, [Report No: 26222], 2003, 18.

<http://documents1.worldbank.org/curated/en/497821468768023490/pdf/262221Shared0vision0PAD.pdf>

Kongo dan Burundi mendukung program tersebut dengan mengembangkan modul edukasi terkait lingkungan dan mengintegrasikannya ke kurikulum pendidikan. Sudan turut mendukung NTEAP melalui pengembangan perencanaan nasional National Environment Management Plan. Uganda dan Kenya turut mendukung NTEAP dengan cara berkoordinasi dengan NBI dalam pengembangan program lingkungan *Trans-boundary wetlands management plan*. Disamping sub-program NTEAP, terdapat sub-program *Water Resources Planning and Management (WRPM)* yang secara garis besar memberikan *guidelines* untuk perumusan kebijakan nasional tiap negara agar memfasilitasi investasi lintas batas dan telah diterima oleh seluruh negara anggota NBI.⁴² Pada laporan NBI Overarching Strategic Plan 2012-2016, NBI secara spesifik menyebutkan bahwa pihaknya akan melakukan penguatan terhadap *National Focal Points*. Hal ini dilakukan melalui program pelatihan dan pengenalan pentingnya keberadaan *Focal Points* tersebut terhadap komunikasi dan operasional NBI.⁴³ NBI menekankan pentingnya menjaga koordinasi antara regional dan nasional. Menurut laporan NBI tahun 2020, *National Focal Points* atau kantor koordinasi nasional di tiap negara masih menjadi bagian struktur organisasi NBI hingga saat ini, serta berhubungan langsung dengan badan Nile-SEC, ENTRO, dan NELSAP-CU dalam NBI.⁴⁴ Disamping itu, NBI tengah mengembangkan proyek *Nile Basin Regional HydroMet System* yang akan membantu perencanaan nasional serta pengambilan keputusan dengan cara meningkatkan aktivitas penyebaran data dan pengetahuan dari negara anggota.⁴⁵

Pada poin kedua, yakni pengembangan terhadap komite koordinasi donor, telah dipenuhi oleh NBI. Berdasarkan dokumen World Bank tahun 2015, pada tahun 2003 telah dibentuk badan Nile Basin Trust Fund (NBTF) yang dimanajemen dan dikoordinasi oleh bantuan World Bank.⁴⁶ NBI sangat bergantung pada dukungan sumber daya dari para partner pembangunan. Berdasarkan laporan World Bank tahun 2003, partner awal NBI adalah World Bank, UNDP, dan CIDA. Seiring dengan dimulainya penyusunan dan perencanaan program strategis, Denmark, Finlandia, Jerman, Italia, Belanda, Norwegia, Swedia, Inggris, Amerika Serikat, FAO, dan GEF mulai memberikan dukungannya melalui NBTF.⁴⁷ Pembentukan NBTF merupakan sebuah tindakan penting guna mengkoordinasi masuknya pendanaan dari donor. Badan tersebut dibentuk atas permintaan Nile-COM. Tujuan pembentukan NBTF salah satunya adalah guna mengumpulkan kontribusi-kontribusi dari berbagai partner pembangunan NBI kedalam satu wadah mekanisme finansial bersama sehingga mampu menyederhanakan prosedurnya yang meliputi pelaporan, pengadaan, serta pencairan dana. Namun pengelolaan NBTF oleh World Bank mengundang pertanyaan dari negara-negara anggota, yang menganggap bahwa selama beroperasi, manajemen NBTF dianggap dimiliki oleh para partner pembangunan. Kepemilikan NBTF dianggap harus tetap berada di bawah para negara anggota. NBTF dibubarkan pada tahun 2015. Meski telah dibubarkan, kesuksesan serta pengalaman dari NBTF mendasari dibentuknya badan baru, yakni *Cooperation in International Waters in Africa (CIWA) Trust Funding*. Badan tersebut dibentuk pada tahun 2011, dan mencakup tidak hanya wilayah aliran Sungai Nil, tapi wilayah aliran sungai di Afrika. Terkait pendanaan, NBI mendapat porsi tertinggi dari CIWA, yakni 32 persen. Disamping itu, pembentukan CIWA mempromosikan masuknya investasi ke Sungai Nil. Tercatat bahwa investasi senilai US\$ 3 miliar telah masuk ke Sungai Nil berkat adanya

⁴² The World Bank, *Programmatic Implementation Completion and Results Report on Nile Basin Trust Fund and Global Environment Facility Grants in the Amount of US\$81.98 Million to the Nile Basin Initiative for the Shared Vision Program*, [Report No. ICR 1493 – AFR], 2010, 24.

<http://documents1.worldbank.org/curated/pt/423891468008466010/pdf/ICR14930P076491e0only1910BOX353800B.pdf>

⁴³ Nile Basin Initiative, *NBI Overarching Strategic Plan 2012 – 2016*, n.d, 10.

https://nilebasin.org/~nileba5/images/docs/NBI_overarching%20strategic%20plan_final_abridged%20version.pdf

⁴⁴ *Corporate Report 2020*, 8.

⁴⁵ *Ibid*, 17.

⁴⁶ *Cooperation on the Nile – Bringing Down the Glass Wall*.

⁴⁷ *Project Appraisal Document for the Shared Vision Program of the Nile Basin Initiative*, 105.

CIWA. Namun meskipun NBI tercatat telah memiliki dukungan finansial yang konsisten serta fleksibel dari para partner pembangunan, pihak *Chairman of the Council of Ministers* dari NBI pada tahun 2015 menyatakan bahwa “*NBI’s greatest challenge today, and in the coming years, is inadequate funding, threatening sustainability of its institutions and products*”. Pihak NBI menyatakan bahwa pihaknya belum mampu memastikan bahwa setiap partner pembangunan akan tetap secara konsisten memberikan dukungannya terhadap NBI hingga seterusnya.⁴⁸

Pembahasan poin ketiga mengacu pada adanya *river parliaments*. NBI dipimpin oleh *Nile Council of Ministers* (Nile-COM), yang merupakan badan politik serta pemangku kepentingan tertinggi. Nile-COM beranggotakan menteri-menteri yang menangani persoalan air di negara-negara anggota. Pada periode 2019-2020, badan ini dipimpin Hon.Sicily Kariuki dari Kenya. Secara spesifik, Nile-COM memiliki 6 tanggung jawab, yakni: 1) Menyetujui rencana kerja dan budget tahunan; 2) Memastikan kelancaran implementasi aktivitas-aktivitas NBI; 3) Memastikan kontribusi pemerintah dari negara-negara anggota serta agensi dukungan eksternal dan para NGO; 4) Menunjuk serta memberhentikan pihak *Executive Director* melalui rekomendasi dari *Nile Technical Advisory Committee*; 5) Pengambilan seluruh keputusan politik serta kebijakan organisasi; 6) Menyetujui pengisian posisi senior lain dari *Nile Technical Advisory Committee*. Nile-COM didukung oleh *Nile Technical Advisory Committee* (Nile-TAC), yang beranggotakan sebanyak 20 senior dari pihak resmi pemerintahan negara-negara anggota. Masing-masing negara anggota memiliki 2 perwakilan. Nile-TAC secara spesifik memiliki 3 poin tanggung jawab, yakni: 1) Memberikan bantuan teknis serta saran kepada *Nile Council of Ministers* terkait manajemen serta pembangunan sungai Nil; 2) Berperan sebagai perantara antara Nile-COM dan partner pembangunan, serta antara Nile-COM dan pihak sekretariat, program, dan proyek-proyek NBI; 3) Mengawasi jalannya aktivitas dan program-program NBI.⁴⁹

Poin keempat mengacu pada perencanaan strategis (*strategic planning*). Terkait poin ini, NBI telah meluncurkan *Strategic Action Program* guna mengimplementasikan visi organisasi. Program tersebut berisikan *Shared Vision Program* (SVP), dan *Subsidiary Action Program* (SAP).⁵⁰ Henriette Ndombe, sebagai *Executive Director* NBI pada periode akhir program SVP menyatakan, “*The Shared Vision Program was created to bring all of the countries together, to create a platform for reflection and discussion*.”⁵¹ SVP merupakan kumpulan dari tujuh proyek yang keseluruhannya bertujuan mengembangkan potensi pembangunan sungai Nil melalui konsultasi para pemangku kepentingan di wilayah tersebut. Program-program SVP antara lain meliputi *Nile Trans-boundary Environmental Action Project* (NTEAP), *Confidence-Building and Stakeholder Involvement* (CBSI) *Project*, *Efficient Water Use for Agricultural Production* (EWUAP) *Project*, *Applied Training* (AT) *Project*, *Nile Basin Regional Power Trade* (RPT) *Project*, *Socio-Economic Development and Benefit-Sharing* (SDBS) *Project*, dan *Integrated Water Resources Planning and Management* (WRPM) *Project*.⁵² Sedangkan untuk program SAP berisikan program-program pembangunan pada tingkat sub-basin, yang melibatkan 2 negara anggota atau lebih.⁵³ Pada wilayah sub-basin tersebut terdapat program kerjasama *Eastern Nile Subsidiary Action Programme* (ENSAP) dan *Nile Equatorial Lakes Subsidiary Action Programme*.⁵⁴ ENSAP merupakan kerjasama antara Mesir, Ethiopia, dan Sudan yang bertujuan mengidentifikasi serta mengembangkan proyek yang memungkinkan adanya situasi bersifat *win-win*.⁵⁵

⁴⁸ Knaepen dan Byiers, “Understanding the Nile Basin Initiative: Balancing historical rights, national needs and regional interests,” 12-14.

⁴⁹ Nile Basin Initiative, *Nile Basin Initiative*, 2020, <https://nilebasin.org/nbi/governance> (diakses 3 Oktober, 2020).

⁵⁰ Hefny dan Amer, “Egypt and the Nile Basin,” 45.

⁵¹ Nile Basin Initiative, “Developing the Nile: Challenges and Opportunities,” 9.

⁵² *Ibid*, 9-11.

⁵³ Hefny dan Amer, “Egypt and the Nile Basin,” 45.

⁵⁴ *Corporate Report 2020*, 7.

⁵⁵ Hefny dan Amer, “Egypt and the Nile Basin,” 45.

Pada tahun 2012-2016, NBI berlanjut ke program *NBI Strategic Plan 2012-2016*. Pada strategi tersebut, NBI menyatakan bahwa berakhirnya SVP menandakan dimulainya fase baru dimana capaian program sebelumnya akan dikembangkan. Terdapat sejumlah poin prioritas NBI pada program ini yang didasari oleh capaian program sebelumnya, meliputi: 1) Peningkatan prioritas untuk aspek finansial yang berkelanjutan dan penguatan terhadap kerja sama dan dialog antar negara anggota meliputi peningkatan pengetahuan hidrologi; 2) Penguatan badan Nile-SEC dalam membentuk unit manajemen sumber daya air serta penguatan terhadap efektivitas organisasi; 3) Penguatan *National Focal Points* guna meningkatkan dialog antar negara anggota serta menunjukkan nilai-nilai sukses NBI dalam memperkuat pembangunan bersama; 4) Pengurangan angka kemiskinan serta peningkatan integrasi ekonomi melalui peningkatan kemampuan NBI dalam memfasilitasi dialog antar negara anggota; dan 5) Mengembangkan SAP agar mampu memberikan peningkatan hasil.⁵⁶

Poin kelima mengacu pada pembentukan organisasi wilayah aliran sungai (*river basin organizations*). Pada poin ini, kehadiran NBI sendiri merupakan perwujudan dari sebuah organisasi wilayah sungai yang bersifat lintas batas antar negara-negara anggotanya. Dalam struktur institusinya, NBI membentuk sub-organisasi yang beranggotakan negara-negara di wilayah yang bersangkutan. Di wilayah timur Sungai Nil terdapat sub-organisasi NBI yang bernama *Eastern Nile Technical Regional Office* (ENTRO). ENTRO dibentuk pada tahun 1999 dan berpusat di Addis Ababa, Ethiopia. Negara yang termasuk wilayah program kerja ENTRO meliputi Mesir, Ethiopia, dan Sudan.⁵⁷ Badan tertinggi di ENTRO adalah *Eastern Nile Council of Ministers* (ENCOM), dan beranggotakan menteri sumber daya air dari Mesir, Ethiopia, Sudan, dan Sudan Selatan. Tugas ENCOM adalah menyetujui rencana kerja dan budget tahunan, memastikan kelancaran aktivitas ENTRO, memastikan kontribusi negara anggota, bantuan eksternal, dan NGO, serta mengambil keputusan politik atas nama organisasi.⁵⁸

Berdasarkan temuan di atas, NBI telah memenuhi kelima poin yang termasuk pada fitur pertama *creation of a cooperative institutional structure*. Hal ini ditunjukkan oleh adanya dukungan terhadap *national plan* pada poin pertama, adanya pembentukan NBT dan CIWA sebagai komite koordinasi donor pada poin kedua, adanya struktur jajaran pemerintahan NBI yang melibatkan partisipasi menteri sumber daya air dari negara-negara anggota pada poin ketiga, dan adanya perumusan *strategic action plan* yang dikenal dengan SVP dan SAP beserta sub-programnya pada poin keempat. Terkait poin kelima, yakni pembentukan *river basin organizations*, penulis menemukan bahwa NBI sendiri merupakan sebuah organisasi wilayah sungai yang mencakup Sungai Nil secara keseluruhan. Namun terkait aktivitas yang spesifik pada wilayah timur sungai, NBI membentuk sub-organisasi guna menangani wilayah tersebut, yakni ENTRO yang dipimpin oleh ENCOM.

d. Peran NBI dalam *Promotion of Stakeholder Participation*

Fitur kedua dari *Functional Value of Hydrosolidarity* menekankan pada pentingnya partisipasi pemangku kepentingan. Pada fitur ini, penulis menemukan sedikitnya 2 (dua) poin penting dari tulisan Gerlak, Varady, dan Haverland, yakni: 1) Adanya partisipasi pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan; dan 2) Adanya partisipasi pihak publik.⁵⁹

Pada poin pertama, penulis menemukan bahwa NBI merupakan institusi yang mempromosikan adanya partisipasi pemangku kepentingan. Pada Juli 2004 NBI mengimplementasikan program *Confidence-Building and Stakeholder Involvement* (CBSI) guna

⁵⁶ NBI *Overarching Strategic Plan 2012 – 2016*, 9-10.

⁵⁷ ENTRO Nile Basin Initiative, *About ENTRO-ENSAP*, 28 Februari, 2011, <http://entro.nilebasin.org/index.php/entro/who-we-are> (diakses 3 Oktober, 2020).

⁵⁸ ENTRO Nile Basin Initiative, *The Eastern Nile Council of Ministers*

, 21 September, 2015, <http://entro.nilebasin.org/index.php/entro-governance> (diakses 3 Oktober, 2020).

⁵⁹ Gerlak, Varady, & Haverland, "Hydrosolidarity and International Water Governance," 318.

membangun jaringan pemangku kepentingan.⁶⁰ World Bank melalui *Nile Basin Trust Fund* menyalurkan dana bersifat *Grant* sebesar US\$ 11.56 juta untuk program CBSI yang disetujui pada Maret 2004.⁶¹ Secara spesifik, program tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan terkait isu-isu manajemen air di wilayah sungai Nil, menyebarkan informasi, membangun jaringan antara pemangku kepentingan, serta membangun sarana penunjang partisipasi dalam diskusi kebijakan. Salah satu faktor penting yang mendasari implementasi program ini adalah masih minimnya sarana yang memungkinkan negara-negara anggota untuk mengadakan dialog serta diskusi. Disamping itu, sebelum adanya program CBSI, hanya sebagian dari pihak kementerian air nasional negara-negara anggota yang mengenal NBI.⁶² Program CBSI ditutup pada Desember 2009.⁶³ Sebagai kelanjutan dari program tersebut, NBI meluncurkan *Communication and Stakeholder Engagement Strategy*. Berdasarkan dokumen *Communication and Stakeholder Engagement Strategy 2013-2016*, NBI menekankan 9 prinsip penting guna memastikan efektivitas komunikasi dan pertemuan antar pemangku kepentingan. Prinsip tersebut meliputi *Consistency, Two-way, Timeliness, Clarity, Accessibility, Targeted, Credible, Planned, dan Efficient*.⁶⁴ Berdasarkan dokumen tersebut, NBI secara spesifik membagi kelompok pemangku kepentingannya dalam 2 kategori, yakni: 1) *Primary Stakeholders*. Pada kategori *Primary Stakeholders*, NBI menyatakan bahwa yang termasuk di dalamnya adalah kelompok-kelompok yang terdampak langsung oleh proyek-proyek NBI, atau disebut juga *Project Affected Persons*, yakni kelompok masyarakat yang kehidupannya akan terdampak oleh adanya proyek-proyek pembangunan sumber daya air; dan 2) *Secondary Stakeholders*. Kategori ini merupakan para pemangku kepentingan yang tidak terdampak secara langsung oleh keputusan yang diambil, namun memiliki peran penting dalam memberikan dukungan tingkat tinggi yang meliputi keputusan dalam kebijakan, serta negosiasi. Kategori ini meliputi partner pembangunan internasional, agensi multilateral, struktur pemerintahan NBI dan pihak kementerian negara-negara anggota terkait urusan air, energi, luar negeri, lingkungan, agrikultur, keuangan, serta para pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan.⁶⁵ Pada praktiknya, implementasi program *Communication and Stakeholder Engagement Strategy* terfokus pada komunikasi informasi serta pengetahuan pada para pemangku kepentingan, memfasilitasi pertemuan serta partisipasi, mendukung adanya pengamanan aspek sosial dan lingkungan, pembahasan isu penting seperti pengurangan kemiskinan, kesetaraan gender, manajemen konflik, dan lain sebagainya, serta melakukan pengawasan dan evaluasi.⁶⁶

Pada tahun 2018, berdasarkan dokumen NBI yang berjudul *Communication and Stakeholder Engagement Strategy 2018-2023*, NBI melanjutkan program tersebut untuk periode 2018-2023 dengan berlandaskan pada dokumen program periode 2013-2016. NBI menyatakan bahwa melalui program sebelumnya, pihaknya secara menerus mempromosikan kepada negara anggotanya terkait pemahaman bahwa “*cooperation is a must, not a choice*”. Menurut NBI, pemahaman tersebut saat ini telah dipegang dan dipahami oleh para negara anggota.⁶⁷ Pada dokumen tersebut NBI menyatakan bahwa pada periode 2018-2023, program *Communication and Stakeholder Engagement Strategy* akan berkontribusi terhadap salah satu dari enam *Strategic Goals* NBI, yakni “*build consensus among the countries’ public and stakeholder for cooperative basin development and management*”.

⁶⁰ Nile Basin Initiative, “Developing the Nile: Challenges and Opportunities,” 9.

⁶¹ *Programmatic Implementation Completion and Results Report on Nile Basin Trust Fund and Global Environment Facility Grants in the Amount of US\$81.98 Million to the Nile Basin Initiative for the Shared Vision Program*, 12.

⁶² Nile Basin Initiative, “Developing the Nile: Challenges and Opportunities,” 9.

⁶³ *Programmatic Implementation Completion and Results Report on Nile Basin Trust Fund and Global Environment Facility Grants in the Amount of US\$81.98 Million to the Nile Basin Initiative for the Shared Vision Program*, 12.

⁶⁴ Nile Basin Initiative, *Communication and Stakeholder Engagement Strategy 2013-2016*, n.d., 9.

https://nilebasin.org/images/docs/Communication%20and%20Stakeholder%20Engagement%20Strategy_ENG_FINAL.pdf

⁶⁵ *Ibid*, 11.

⁶⁶ *Communication and Stakeholder Engagement Strategy 2013-2016*, 13.

⁶⁷ Nile Basin Initiative, *Communication and Stakeholder Engagement Strategy 2018-2023*, 2018, 5.

https://nilebasin.org/images/docs/NBI_Communication_and_Stakeholder_Engagement_Strategy_2018-2023.pdf

Secara lebih spesifik, NBI menyatakan terdapat dua tujuan yang bersifat menyeluruh dalam strategi tersebut guna memenuhi goals di atas, yakni: 1) *To create foundation for factual and constructive dialogue on Nile Basin issues*; dan 2) *To get buy-in for NBI's activities in order to address challenges in the Nile Basin*.⁶⁸ Kedua tujuan secara garis besar bertujuan menginformasikan tantangan yang dihadapi sungai Nil kepada para pemangku kepentingan, menyebarkan informasi pada para pemangku kepentingan secara berkala serta mengadakan forum pertemuan, serta mengembangkan *strategic partnerships* guna berinteraksi dengan kelompok pemangku kepentingan tertentu.⁶⁹ NBI mengkategorisasikan kelompok pemangku kepentingan ke dalam sejumlah kategori. Pada dokumen periode 2013-2016, kategori tersebut secara luas terbagi dalam *Primary Stakeholders* dan *Secondary Stakeholders*. Pada dokumen periode 2018-2023, NBI menambahkan kategori *NBI staff*, yang menunjukkan bahwa setiap pembagian informasi antar juga harus mencapai seluruh anggota staf, dan mereka diharapkan mampu memberikan informasi dasar yang akurat tentang NBI kepada kelompok-kelompok pemangku kebijakan lain. Disamping itu terdapat kategori *NBI's core governance group*. Pada kategori ini, NBI menekankan bahwa struktur pemerintahan NBI yang termasuk jajaran *council of ministers, technical advisory committees*, serta kantor-kantor nasional NBI, merupakan kelompok yang memiliki tingkat kepentingan tinggi dan berpengaruh dalam program kerja NBI. Kelompok ini menurut NBI harus selalu dilibatkan dalam setiap program kerja dan pembangunan di wilayah sungai Nil serta dalam proses pengambilan keputusan. Selain kedua kategori diatas, terdapat kategori *Extended governance group in national ministries*. Kelompok ini meliputi pihak-pihak resmi dari kementerian negara-negara anggota yang memiliki keterkaitan dengan sumber daya air sungai Nil, seperti kementerian energi, agrikultur, perikanan, lingkungan, luar negeri, serta perencanaan. NBI menyatakan bahwa kelompok ini memiliki tingkat kepentingan menengah hingga tinggi, serta pengaruh tinggi sampai sangat tinggi terhadap program kerja NBI. Kelompok ini perlu untuk diinformasikan secara penuh terkait potensi benefit yang muncul dari implementasi strategi NBI terhadap wilayah kerja mereka guna meningkatkan tingkat kepentingan mereka terhadap NBI. Dengan meningkatnya tingkat kepentingan mereka, NBI menyatakan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan melibatkan individu-individu penting dalam struktur pemerintahan penting, seperti *Regional Expert Working Groups*, maupun *Project Steering Committees*.⁷⁰

Poin kedua dari *promotion of stakeholder participation* mengacu pada adanya partisipasi publik. Pada program CBSI, NBI menjalankan program kampanye penyebaran informasi secara intensif guna menyebarkan informasi terkait isu-isu seputar sungai Nil. Melalui program CBSI, NBI menerbitkan sejumlah publikasi, program radio, program televisi, serta mengajak anggota-anggota pemerintahan, pengacara, guru, perempuan, serta para jurnalis dalam lingkup lintas batas untuk membentuk sebuah jaringan bersama. Jaringan tersebut kemudian menciptakan sejumlah sarana yang menghubungkan antara NBI dan masyarakat. Pertama, penciptaan sebuah pusat data daring yang dikenal dengan sebutan *Nile Basin Knowledge System* yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. Kedua, pengadaan forum pertemuan publik pada hari-hari tertentu yang dikenal dengan "*Nile Day*". Pada hari-hari tersebut, seluruh elemen masyarakat dapat bergabung dan berdiskusi secara terbuka terkait pembangunan di wilayah sungai Nil. Ketiga, pembentukan *Nile Media Network*, yakni sebuah jaringan jurnalis di tiap negara anggota yang bertujuan menyampaikan pesan-pesan dari NBI ke kalangan masyarakat. Hal ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait aktivitas NBI, serta terhadap isu-isu seputar sungai Nil.⁷¹

⁶⁸ *Communication and Stakeholder Engagement Strategy 2018-2023*, 7.

⁶⁹ *Ibid*, 7-8.

⁷⁰ *Communication and Stakeholder Engagement Strategy 2018-2023*, 11.

⁷¹ Nile Basin Initiative, "Developing the Nile: Challenges and Opportunities," 9-10.

Berdasarkan dokumen *Communication and Stakeholder Engagement Strategy 2018-2023*, NBI menyatakan bahwa pada sub-strategi yang terkandung pada strategi tersebut, pihaknya akan mengadakan analisa konten media yang diterbitkan ke publik yang mengandung berita terkait kerjasama sungai Nil. Hal ini dilakukan guna menginformasikan adanya kesalahpahaman yang berpotensi mempengaruhi kerjasama di wilayah sungai Nil. NBI menyatakan bahwa pada diskursus publik dan politik seputar urusan sungai Nil, sering terdapat kesalahpahaman yang mampu menghalangi terciptanya dialog pencarian solusi. Disamping itu, NBI akan berinteraksi dengan pihak media guna mengembangkan narasi-narasi yang konstruktif dalam rangka mempromosikan kerjasama wilayah sungai Nil. Selain media, NBI menyatakan bahwa pihaknya akan memperbaiki implementasi acara-acara publik seperti *Nile Day* dan lain sebagainya guna menyampaikan pesan-pesan yang secara langsung akan memberikan benefit bagi implementasi agendanya. Pada praktiknya, NBI menyatakan akan mengadakan kolaborasi dengan organisasi-organisasi regional dalam penyelenggaraan acara publik, serta memanfaatkan kesempatan di acara-acara organisasi lain, termasuk acara regional serta acara global, untuk menyampaikan informasi dengan lebih baik.⁷²

Pada pembahasan fitur kedua, penulis menyatakan bahwa NBI telah memenuhi kedua aspek penting yang dibutuhkan, yakni adanya aktivitas yang mendukung partisipasi pemangku kepentingan, serta adanya aktivitas yang mendukung partisipasi publik.

e. Peran NBI dalam *Development of Shared Knowledge*

Fitur ketiga dari *Functional Value of Hydrosolidarity* mengacu pada pembagian informasi serta pengetahuan antar negara-negara yang memanfaatkan sungai yang bersangkutan sebagai sumber daya.

Berdasarkan laporan World Bank tahun 2010, pada survey opini publik yang diadakan tahun 2008 di delapan negara-negara anggota NBI, publik menilai bahwa sebelum adanya implementasi program SVP, proses pertukaran informasi serta data antar negara wilayah sungai Nil sangat minim. Pihak koordinator program CBSI menambahkan bahwa terdapat “*discussion taboo*” sebelum adanya implementasi SVP. Para pemangku kepentingan menilai bahwa implementasi SVP menciptakan kesempatan bagi mereka dan pihak publik untuk mengadakan *knowledge-based exchange*. Secara lebih spesifik, pihak Nile-COM menciptakan sebuah prosedur yang dikenal dengan sebutan *interim procedures* dalam proses pertukaran data dan informasi.⁷³ Tujuan utama dari *Interim Procedures* adalah untuk memfasilitasi kesuksesan implementasi proyek serta program-program NBI. Poin-poin penting pada prosedur tersebut antara lain: 1) Negara-negara NBI memberikan bantuan berupa ketersediaan data serta informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi persiapan dan implementasi proyek dan program NBI; dan 2) Pembentukan sebuah *Shared Regional Knowledgebase* yang berfungsi memfasilitasi pembukuan, pemeliharaan, serta diseminasi data dan informasi secara sistematis.⁷⁴

Selain implementasi *interim procedures*, peran NBI dalam pembagian informasi ke negara-negara anggota adalah dengan mengimplementasikan program *Nile Basin Regional HydroMet Project*. Berdasarkan laporan NBI tahun 2020, proyek tersebut bertujuan meluncurkan sebuah sistem yang dikenal dengan sebutan *Nile Basin Regional HydroMet System*. Proyek tersebut diluncurkan pada November 2019, dan disetujui oleh negara-negara anggota pada Februari 2020. NBI menyatakan “*The*

⁷² *Communication and Stakeholder Engagement Strategy 2018-2023*, 8.

⁷³ *Programmatic Implementation Completion and Results Report on Nile Basin Trust Fund and Global Environment Facility Grants in the Amount of US\$81.98 Million to the Nile Basin Initiative for the Shared Vision Program*, 24.

⁷⁴ Seifeldin Hamad dan Abdulkrim Seid, “Sustainability in Monitoring and Data Exchange: The Nile Basin Initiative Case” (presentation, Global Workshop on Exchange of Data and Information in Transboundary Basins, Nile Basin Initiative, Geneva, 4-5 Desember, 2019). https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2019/WAT/12Dec_4-5_Global_Workshop_on_Data_Exchange/S6.3_SeifeldinAbdalla_Nile_Basin_approach_to_data_sharing-Seifeldin.pdf

first of its kind, the Nile Basin Regional HydroMet System will inform national planning and evidencebased decision making by enabling Burundi, DR Congo, Ethiopia, Kenya, Rwanda, South Sudan, Sudan, Tanzania and Uganda to share reliable data and knowledge for better monitoring of the Nile's water resources." NBI menyatakan bahwa keberadaan sistem tersebut bertujuan untuk memungkinkan negara-negara anggota dalam membagi data dan pengetahuan yang dapat diandalkan guna memonitor sumber daya air sungai Nil. NBI menyebutkan bahwa sembilan negara-negara anggota menyetujui rehabilitasi sebanyak 68 stasiun hidrologi di tiap negara anggota, serta membangun sebanyak 5 stasiun baru. Tujuannya adalah pembaharuan terhadap *system baseline*. Menurut NBI, proyek tersebut akan menyediakan data serta informasi yang dapat diandalkan untuk manajemen dan pembangunan sumber daya air. Aspek-aspek di dalamnya meliputi persiapan terhadap bencana, manajemen terkoordinasi terhadap bendungan, navigasi, serta adaptasi perubahan iklim dan investasi yang lebih baik. Sebagai tambahan, implementasi proyek tersebut mendapatkan dukungan dari Uni Eropa dan Jerman melalui *German International Cooperation (GIZ)*.⁷⁵

Berdasarkan temuan di atas, penulis menyatakan bahwa NBI telah memenuhi peran dalam fitur *Development of Shared Knowledge*. Hal ini dikarenakan telah terdapat aspek pembagian *information* serta *knowledge* antar negara-negara anggota yang dilakukan melalui sejumlah program, strategi, serta prosedur tertentu.

f. Peran NBI dalam *Enhanced Integration and Linkages*

Fitur keempat dari *Functional Value of Hydrosolidarity* mengacu pada pendekatan yang terintegrasi terhadap sungai lintas batas. Menurut Gerlak, Varady, dan Haverland, pada fitur ini perlu adanya manajemen air yang saling terhubung guna memastikan potensi dampak yang muncul yang kemudian akan mempengaruhi aktivitas ekonomi serta kehidupan ekosistem perairan. Disamping itu, manajemen di sungai yang bersangkutan juga memperhatikan serta saling menghubungkan aspek *food security*, *water security*, dan *environmental security*.⁷⁶

Pada *Shared Vision Program (SVP)*, NBI menyatakan bahwa program tersebut akan bersifat multi-sektor yang mengundang negara-negara anggotanya untuk saling berkoordinasi dalam tujuh program besar. Terkait pembahasan pada aspek lingkungan, terdapat program *Nile Trans-Boundary Environmental Action Project (NTEAP)*. Program ini memberikan pelatihan pada masyarakat melalui sejumlah *capacity-building workshops* terkait pentingnya perlindungan terhadap lingkungan. NTEAP diawali dengan program pelatihan ke masyarakat, dan berlanjut ke proyek-proyek di tingkat komunitas di negara-negara anggota. Di Rwanda, terdapat proyek pemanfaatan tanaman eceng gondok. Di Kenya, terdapat proyek penanaman pohon guna mencegah erosi. Kemudian di Burundi, terdapat proyek implementasi teknik terasering. Proyek di tiap negara anggota secara spesifik bervariasi, namun didasari oleh tujuan membantu masyarakat menanamkan kebiasaan baru yang tidak destruktif terhadap lingkungan.⁷⁷

Disamping program NTEAP, terdapat proyek *Efficient Water Use for Agricultural Production (EWUAP)* didalam SVP. Proyek ini terfokus pada pengadaan program pelatihan bagi para petani negara anggota guna meningkatkan efisiensi penggunaan air. Hal ini didasari adanya peningkatan permintaan air akibat peningkatan populasi. Pada praktiknya, proyek EWUAP membentuk sebuah forum diskusi guna mengidentifikasi teknik serta teknologi yang akan dimanfaatkan terkait irigasi dan pengumpulan air. Kemudian dilanjutkan dengan pengadaan program pelatihan guna membangun kapasitas para peserta di negara-negara anggota.⁷⁸ Selain NTEAP dan EWUAP, terdapat proyek

⁷⁵ *Corporate Report 2020*, 17.

⁷⁶ Gerlak, Varady, & Haverland, "Hydrosolidarity and International Water Governance," 320-321.

⁷⁷ Nile Basin Initiative, "Developing the Nile: Challenges and Opportunities," 9.

⁷⁸ Nile Basin Initiative, "Developing the Nile: Challenges and Opportunities," 10.

Integrated Water Resource Planning and Management (IWRPM). Proyek ini membahas pentingnya pembentukan *common water policy* antar negara anggota guna mensukseskan manajemen air bersama.⁷⁹ Menurut laporan World Bank tahun 2010, proyek ini mengajak negara anggota untuk bekerja sama dalam posisi yang setara. Pengambilan keputusan tidak hanya dipertimbangkan melalui sudut pandang regional, namun juga didasari oleh kebijakan manajemen air nasional tiap negara anggota. Pada proyek ini telah terbentuk sebuah sistem *Nile Basin DSS (Decision Support System)* yang bertujuan membantu proses pertukaran informasi, komunikasi, serta analisa sumber daya air.⁸⁰

Pada tahun 2017, NBI menyatakan bahwa pihaknya tengah mengembangkan strategi berjangka 10 tahun untuk periode 2017-2027. Strategi tersebut disetujui oleh jajaran Nile-COM pada Oktober 2017 pada pertemuan tahunan ke-25 Nile-COM yang digelar di Uganda. Pihak Executive Director Nile-SEC, Eng. Innocent Ntabana, menyatakan bahwa strategi 10 tahunan tersebut akan memberikan kesinambungan yang jelas antara aspek *water, energy, food*, serta *environment*, sebagaimana tertera dibawah ini:

“The 10-year Strategy is inspired by and provides a tool for implementing, the Shared Vision Objective of the Nile Basin Initiative (NBI), which is ‘to achieve sustainable socio-economic development through equitable utilization of, and benefit from the shared Nile Basin water resources’. Among other things, the Strategy provides clear linkages between the key development goals of water, energy, food and environment and focusses on win-win harnessing of these natural resources.” –Eng. Innocent Ntabana.⁸¹

Innocent Ntabana menambahkan bahwa strategi 10-tahunan tersebut akan diimplementasikan melalui program-program 5-tahunan yang disiapkan oleh Sekretariat di Uganda, Eastern Nile Technical Regional Office di Ethiopia, dan Nile Equatorial Lakes Subsidiary Action Program Coordination Unit di Rwanda.⁸² Pada pembahasan fitur keempat, penulis menyatakan bahwa NBI mendukung adanya manajemen air yang terintegrasi serta menciptakan *linkages* antar isu penting melalui adanya program kerja serta strategi yang telah diimplementasikan NBI, maupun tengah dalam pengembangan untuk implementasi di masa mendatang.

Kesimpulan

Melalui penelusuran keempat fitur yang terkandung dalam *functional values of Hydrosolidarity*, penulis menemukan bahwa keberadaan NBI merupakan sebuah instrumen penting dalam mempromosikan *Hydrosolidarity* antar negara-negara wilayah Sungai Nil. Peran NBI sebagai sebuah institusi memenuhi keempat fitur *Functional Value of Hydrosolidarity*, yakni sebagai institusi kooperatif, promotor partisipasi pemangku kepentingan, mendukung penyebaran informasi dan pengetahuan antar negara anggota, serta mendukung adanya integrasi dan perhubungan. Peran tersebut menunjukkan bahwa NBI memiliki posisi penting dalam menjalin kerjasama internasional antar negara-negara wilayah Sungai Nil terkait manajemen sumber daya air sungai tersebut. Sungai Nil merupakan aliran air yang menjadi sumber kehidupan sebanyak lebih dari 300 juta jiwa di negara-negara wilayah alirannya. NBI memiliki misi serta peran penting dalam menjaga *water security, food security*, serta aspek penting lainnya yang terkandung dalam rencana kerjanya.

Penulis menilai bahwa kemampuan NBI dalam menjaga konsistensi keempat fitur *Functional Value Hydrosolidarity* akan menjadi penting dalam manajemen sungai Nil hingga ke masa mendatang.

⁷⁹ Ibid, 11.

⁸⁰ *Programmatic Implementation Completion and Results Report on Nile Basin Trust Fund and Global Environment Facility Grants in the Amount of US\$81.98 Million to the Nile Basin Initiative for the Shared Vision Program*, 75.

⁸¹ Innocent Ntabana, “Message from The Executive Director,” *NileNews* Volume 14, Issue 4, Desember, 2017, 2. https://nilebasin.org/images/newsletters/Nile-News_Dec-2017.pdf (diakses 12 Oktober 2020).

⁸² Ibid.

Namun NBI sebagai sebuah institusi tidak mampu berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi yang terintegrasi antara negara anggota, pemangku kepentingan dari berbagai pihak regional maupun internasional, serta partisipasi publik dalam mendukung agenda kerja NBI. Pihak negara anggota perlu untuk tetap mendukung keterlibatan pihak resmi kementerian urusan air dan yang berkaitan untuk berintegrasi dengan NBI guna menciptakan program kerja yang mendukung tidak hanya agenda nasional negara yang bersangkutan, namun juga program kerja regional di wilayah sungai Nil. NBI sebagai sebuah institusi regional perlu untuk tetap menjaga keterlibatan publik secara aktif melalui implementasi program pelatihan, maupun forum diskusi yang memungkinkan penyebaran informasi terkait program kerja dan pembangunan di wilayah sungai Nil. Secara garis besar, penulis menyimpulkan bahwa dalam menjaga kerjasama antar negara-negara wilayah sungai Nil, penting bagi NBI untuk terus mendesain kebijakan serta program kerja regional yang mampu memenuhi aspek-aspek yang terkandung dalam keempat fitur *Hydrosolidarity* sebagaimana dipaparkan penulis dalam penelitian ini.

Melalui pembahasan keempat fitur diatas, peneliti dalam bidang yang sama dapat memanfaatkan temuan penelitian ini sebagai basis penelitian kerjasama di wilayah Sungai Nil. Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dapat ditelusuri lebih jauh oleh para peneliti lain terkait partisipasi tiap negara anggota pada tiap program kerja yang secara spesifik tercantum pada pembahasan diatas. Disamping itu, peran World Bank serta negara donor terhadap program-program kerja NBI dapat diteliti lebih mendalam oleh para peneliti. Penulis menyatakan dengan segala kerendahan hati bahwa penelitian ini masih mengandung keterbatasan terkait data-data statistik terkini yang berkaitan dengan topik yang ditulis. Dengan demikian, dibutuhkan penelitian lanjutan yang mampu secara lebih lanjut mengisi kekurangan tersebut.

Daftar Pustaka

- Abawari, Yaekob Mekuria. "Conflict and Cooperation among the Nile Basin Countries with Special Emphasis on the Nile Basin Initiative (NBI)." (2011).
- Abdelhady, Dalia, Karin Aggestam, Dan-Erik Andersson, Olof Beckman, Ronny Berndtsson, Karin Broberg Palmgren, Kaveh Madani, Umut Ozkirimli, Kenneth M. Persson, and Petter Pilesjö. "The Nile and the Grand Ethiopian Renaissance Dam: Is There a Meeting Point between Nationalism and Hydrosolidarity?" *Journal of Contemporary Water Research & Education* 155, no. 1 (July 2015): 73–82. <https://doi.org/10.1111/j.1936-704x.2015.03197.x>.
- Awulachew, Seleshi, Vladimir Smakhtin, David Molden, and Don Peden. "Nile River Basin WATER, AGRICULTURE, GOVERNANCE and LIVELIHOODS EDITED BY." Accessed November 5, 2019. http://www.iwmi.cgiar.org/Publications/Books/PDF/the_nile_river_basin-water_agriculture_governance_and_livelihoods.pdf.
- Belay, Alebel Abebe, Henry Musoke Semakula, George James Wambura, and Labohy Jan. "SWOT Analysis and Challenges of Nile Basin Initiative: An Integrated Water Resource Management Perspective." *Chinese Journal of Population Resources and Environment* 8, no. 1 (March 2010): 8–17. <https://doi.org/10.1080/10042857.2010.10684960>.
- El Bedawy, Randa. "Water Resources Management: Alarming Crisis for Egypt." *Journal of Management and Sustainability* 4, no. 3 (August 28, 2014). <https://doi.org/10.5539/jms.v4n3p108>.
- Elnour, Mugahid. "The Impact of the Grand Ethiopian Renaissance Dam on the Water-Energy-Food Security Nexus in Sudan." *Uppsala University*, 2019.
- ENTRO Nile Basin Initiative. *About ENTRO-ENSAP*. Retrieved from ENTRO Nile Basin Initiative: 2011 <http://entro.nilebasin.org/index.php/entro/who-we-are>

- ENTRO Nile Basin Initiative. “*The Eastern Nile Council of Ministers*” Retrieved October 3, 2020, from ENTRO Nile Basin Initiative: <http://entro.nilebasin.org/index.php/entro-governance>
- Falkenmark, M., and C. Folke. “The Ethics of Socio-Ecohydrological Catchment Management: Towards Hydrosolidarity.” *Hydrology and Earth System Sciences* 6, no. 1 (February 28, 2002): 1–10. <https://doi.org/10.5194/hess-6-1-2002>.
- FAO, and IHE Delft. *Water Accounting in the Nile River Basin*. FAO, 2020. <https://doi.org/10.4060/ca9895en>.
- Korwa, Johni Robert Verianto. “The China-Australia Free Trade Agreement (ChAFTA): Its Implications for Australia-United States Relations.” *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 15, no. 1 (July 1, 2019): 41–53. <https://doi.org/10.26593/jihi.v15i1.2981.41-53>.
- Hamad, S, and A Seid. “Sustainability in Monitoring and Data Exchange: The Nile Basin Initiative Case by Seifeldin Hamad & Abdulkrim Seid Nile Basin Initiative Secretariat Global Workshop on Exchange of Data and Information in Transboundary Basins, Geneva, 4-5,” 2019. https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2019/WAT/12Dec_4-5_Global_Workshop_on_Data_Exchange/S6.3_SeifeldinAbdalla_Nile_Basin_approach_to_data_sharing-Seifeldin.pdf.
- Hefny, Magdy, and Salah El-Din Amer. “Egypt and the Nile Basin.” *Aquatic Sciences* 67, no. 1 (March 2005): 42–50. <https://doi.org/10.1007/s00027-004-0765-y>.
- Knaepen, Hanne, and Bruce Byiers. “Understanding the Nile Basin Initiative Balancing Historical Rights, National Needs and Regional Interests,” 2017. <https://ecdpm.org/wp-content/uploads/NBI-Background-Paper-PEDRO-Political-Economy-Dynamics-Regional-Organisations-Africa-ECDPM-2017.pdf>.
- Mohamed, Yasir, and Makonnen Loulseged. “The Nile Basin Water Resources: Overview of Key Research Questions Pertinent to the Nile Basin Initiative,” 2008. http://www.iwmi.cgiar.org/Publications/Working_Papers/working/WOR127.pdf.
- Nile Basin Initiative. “*Communication and Stakeholder Engagement Strategy 2018-2023*”, 2018 https://nilebasin.org/images/docs/NBI_Communication_and_Stakeholder_Engagement_Strategy_2018-2023.pdf
- Nile Basin Initiative. “*Corporate Report*” 2020. <https://nilebasin.org/documents-publications/88-corporate-report-2020>
- Nile Basin Initiative. (2020). *Governance*. Retrieved October 3, 2020, from Nile Basin Initiative: <https://nilebasin.org/nbi/governance>
- Nile Basin Initiative. (n.d.). *Communication and Stakeholder Engagement Strategy 2013-2016*. https://nilebasin.org/images/docs/Communication%20and%20Stakeholder%20Engagement%20Strategy_ENG_FINAL.pdf
- Nile Basin Initiative. “Governance | Welcome to Eastern Nile Technical Regional Office (ENTRO),” n.d. <http://entro.nilebasin.org/index.php/entro-governance>.
- Nile Basin Initiative. “NBI STRATEGY 2017 -2027 ABRIDGED VERSION,” 2017. <https://nilebasin.org/images/docs/NBI-Strategy-2017---2027.pdf>.
- Nile Basin Initiative NBI Overarching Strategic Plan,” 2012. https://nilebasin.org/~nileba5/images/docs/NBI_overarching%20strategic%20plan_final_abridged%20version.pdf.
- Nile Basin Initiative. “Who We Are | Welcome to Eastern Nile Technical Regional Office (ENTRO),” February 28, 2011. <http://entro.nilebasin.org/index.php/entro/who-we-are>.

- Ntabana, I. "Message from the Executive Director. NileNews: Nile Basin States to Boost Cooperation for Water Security.t," December 2017. https://nilebasin.org/images/newsletters/NileNews_Dec-2017.pdf.
- Obengo, Joel Okundi. "Hydropolitics of the Nile: The Case of Ethiopia and Egypt." *African Security Review* 25, no. 1 (January 2, 2016): 95–103. <https://doi.org/10.1080/10246029.2015.1126527>.
- Satya, Putu Agung Nara Prima. "COVID- 19 Dan Potensi Konflik Sosial." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 2020, 39–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.26593/jihi.v1i1.3867.39-45>.
- School, Dissertations, and John Merrill. "Scholar Commons Water Management and Decision-Making in the Nile Basin: A Case Study of the Nile Basin Initiative," 2008. <https://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1401&context=etd>.
- The World Bank. "Cooperation on the Nile - Bringing down the Glass Wall | World Bank Group," 2016. <https://olc.worldbank.org/content/cooperation-nile-bringing-down-glass-wall>.
- The World Bank. "Programmatic Implementation Completion and Results Report on Nile Basin Trust Fund and Global Environment Facility Grants in the Amount of US\$81.98 Million to the Nile Basin Initiative for the Shared Vision Program." *The World Bank*. The World Bank, 2010. <http://documents1.worldbank.org/curated/pt/423891468008466010/pdf/ICR14930P076491e00nly1910BOX353800B.pdf>.
- The World Bank. "PROJECT APPRAISAL DOCUMENT for the SHARED VISION PROGRAM of the NILE BASIN INITIATIVE." The World Bank, 2003. <http://documents1.worldbank.org/curated/en/497821468768023490/pdf/262221Shared0vision0PAD.pdf>.
- Varady, Robert, Andrea Gerlak, and Arin Haverland. "Hydrosolidarity and International Water Governance." *International Negotiation* 14, no. 2 (2009): 311–28. <https://doi.org/10.1163/157180609x432842>.
- Wouters, Patricia, Sergei Vinogradov, and Bjørn-Oliver Magsig. "Water Security, Hydrosolidarity, and International Law: A River Runs through It" papers.ssrn.com. Rochester, NY, 2009. <https://ssrn.com/abstract=2365328>.